



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyempatkan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN Pematang TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang
 - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pematang
 - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang
 - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
 - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
 - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pematang
 - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petajukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comel
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ujungjati
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Betik
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PEMALANG





**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2022



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG
Jalan Alun-Alun Timur No. 4 Pemalang**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dapat diterbitkan. Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana satu tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya

Dengan disusunnya RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2022 ini maka Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang telah mempunyai rencana rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2021-2026.

Dampak arus globalisasi yang makin meluas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta karakteristik sumberdaya kelautan dan perikanan akan berpengaruh pula pada pembangunan perikanan di Kabupaten Pemalang.

Dalam upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan potensi daerah, maka di perlukan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas perikanan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Perikanan pada tahun 2022. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders dan instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022 ini dapat tersusun dengan baik.

Pemalang, 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG



SUHARTO, S.IP., M.Si

Rembina Utama Muda

NIP, 19620427 198603 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN	6
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Landasan Hukum	17
1.3 Maksud dan Tujuan.....	20
1.4 Sistematika Penulisan	21
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	22
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan capaian Renstra SKPD	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	48
2.3 Hasil Evaluasi SAKIP Pada Dinas Perikanan.....	51
2.4 Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD.....	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	73
2.6 Pokok – Pokok Pikiran Dewan.....	77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	78
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2 Program dan Kegiatan	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dinas Perikanan.....	103

BAB V PENUTUP	122
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Pemalang.....	23
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
3. Tabel 2.3. Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.....	52
4. Tabel 2.4. Reiew Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	54
5. Tabel 2.5. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	73
6. Tabel 2.6 Daftar pokok – pokok pikiran dewan tahun 2022	77
7. Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kab. Pemalang.....	85
8. Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	107



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERIKANAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : / /2021

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022; Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan landasan operasional bagi
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang nantinya akan menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026;

- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perikanan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobagan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 yang memuat Rencana Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

4.2. Pendanaan

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi, Uraian dan perincian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul bsebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal, Agustus 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG

SUHARTO, S.IP., M.Si
NIP. 19620427 198603 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA
DISPERIK KABUPATEN
PEMALANG

NOMOR : 050/ /2021
TANGGAL : Agustus 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program kerja
- Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022
- RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Pemerintah Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

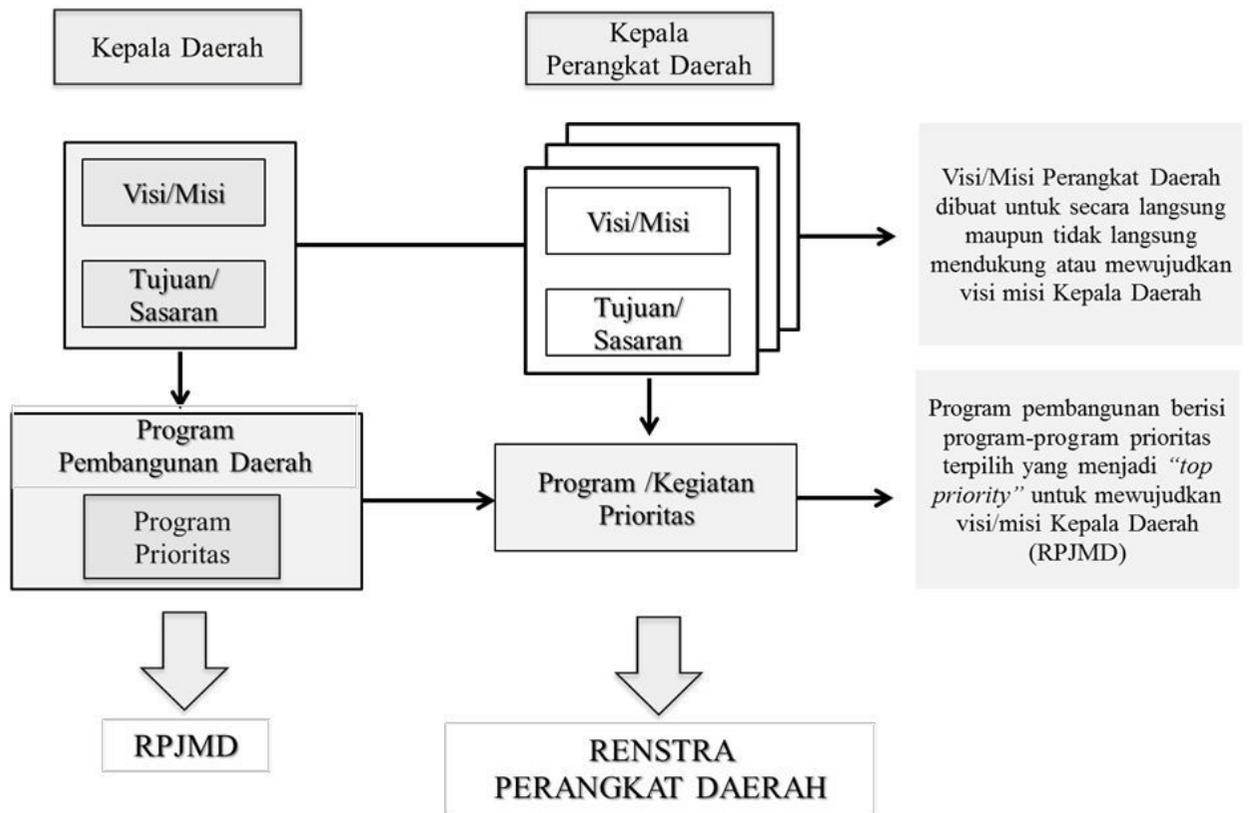
- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
- Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026;
- Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber Gambar : Permendagri No 86 Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang disesuaikan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Disamping itu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap. Ayat (2) Pasal 2, menyatakan bahwa setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan kebijakan nasional.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menentukan arah pembangunan yang mampu menjawab tuntutan perkembangan jaman baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global.

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022, senantiasa diselenggarakan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Visi “**Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2022 sesuai Peraturan Bupati Pematang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang- Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo- Magelang- Temanggung, dan Kawasan Brebes- Tegal- Pemalang;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018- 2038
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026;

23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pemalang

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah :

- a. Untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, baik jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang berpedoman kepada RKPD 2022 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang selama 1 (satu) tahun yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Imbas peningkatan penyebaran Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat, disikapi dengan penyesuaian rumusan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 yang ditetapkan sebagai tahun pemulihan. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk :

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya dalam melaksanakan rencana kegiatan dalam tahun berjalan untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang meliputi 32 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) urusan wajib, 8 (delapan) urusan pilihan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019 Dinas perikanan Kabupaten Pematang Jaya dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Pemalang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3										
3	25									

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai evaluasi sakip - Indeks RB - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %					100 %	100 %	100 %
3	25	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, laporan kinerja, evaluasi	3 dokumen	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %

						kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD								
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah musrenbang perikana yang dilaksanakan	3 kegiatan	9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	34 buku	25 buku	25 buku	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	1 dokumen	33 buku	20 buku	20 buku	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	1 dokumen	34 buku	25 buku	25 buku	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan	1 dokumen	33 buku	20 buku	20 buku	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %

						dokumen DPA skpd yang disusun								
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 dokumen	150 buku	40 buku	40 buku	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
3	25	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100%							100 %
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	38 orang, 14 bulan					38 orang, 14 bulan	38 orang, 14 bulan	100 %
3	25	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelolaan keuangan daerah yang difasilitasi	23 orang, 12 bulan					23 orang, 12 bulan	23 orang, 12 bulan	100 %

3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 dokumen	35 buku	10 buku	10 buku	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %
3	25	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 laporan	55 buku	10 buku	10 buku	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %
3	25	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah	100%					1	1	100 %
3	25	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100 %
3	25	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase terselenggaranya administrasi pendapatan	100%					100		100 %

						daerah kewenangan perangkat daerah								
3	25	01	2,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terselenggaranya	100%							100 %
3	25	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 laporan	20 buku	12 kali	12 kali	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	2 kegiatan, 110 orang	4 kegiatan	1 kegiatan	-		2 kegiatan, 110 orang	2 kegiatan, 110 orang	100 %

3	25	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100%								100 %
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket		100 %
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	3 paket	1 paket	1 paket	100 %	5 jenis	5 jenis		100 %
3	25	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 paket	6 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket		100 %

						Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli								
						Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang dibeli								
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1 paket	4 paket	2 paket	2 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	1 paket	198 eksemplar	90 eksemplar	90 eksemplar	100 %	1 paket	1 paket	100 %
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	240 kali, 12 bulan	752 oh	12 bulan	12 bulan	100 %	240 kali, 12 bulan	240 kali, 12 bulan	100 %

3	25	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 jenis					3 jenis	3 jenis	100 %
3	25	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 jenis	-	-	-	-	1 jenis	1 jenis	100 %
3	25	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	2 set	4 paket	47 unit	47 unit	100 %	2 set	2 set	100 %
3	25	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	17 buah	-	8 unit	8 unit	100 %	17 buah	17 buah	100 %
3	25	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 set	23 unit	3 paket	3 paket	100 %	1 set	1 set	100 %
3	25	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan	3 jenis					3 jenis	3 jenis	100 %

3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	4 jenis	15 unit	15 unit	100 %	25 unit	25 unit	100 %
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	4 gedung	1 paket	1 paket	100 %	2 gedung	2 gedung	100 %
3	25	01	2,13		Penataan Organisasi	Prosentase dukungan terhadap penataan organisasi	100%							100 %
3	25	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100 %
3	25	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring evaluasi dan penegndalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100 %

						yang terlaksana								
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase TPI yang memenuhi standart	10 % (dalam 5 tahun)					10 % (dalam 5 tahun)	10 % (dalam 5 tahun)	100 %
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data sumber daya ikan dan terpeliharaan ya fasilitas tempat pelelangan ikan	2 jenis (data dan sarpras TPI)					2 jenis (data dan sarpras TPI)	2 jenis (data dan sarpras TPI)	100 %
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate / tersedia	5 kali	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	5 kali	5 kali	100 %
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah fasilitasi TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	14 paket	4 paket	3 paket	3 paket	100 %	14 paket	14 paket	100 %

3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)					2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	100 %
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan	7 kali	3 kegiatan	1 kegiatan	-		7 kali	7 kali	100 %
3	25	03	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	1 kali	12 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	1 kali	1 kali	100 %
3	25	03	2,03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)					2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	100 %
3	25	03	2,03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	Jumlah pelaku perikanan	3 kali; 12bulan	5 TPI	5 TPI	5 TPI	100 %	3 kali; 12bulan	3 kali; 12bulan	100 %

					Pelelangan Ikan (TPI)	yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (jumlah pemutahiran pelaku perikanan)								
3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI	15 kali	5 TPI	5 TPI	5 TPI	100 %	15 kali	15 kali	100 %
3	25	03	2,04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)					2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	100 %

3	25	03	2,04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	100 %
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase sarana dan prasarana yang tertangani	10 % (dalam 5 tahun)					10 % (dalam 5 tahun)	10 % (dalam 5 tahun)	100 %
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina	4 jenis kegiatan					4 jenis kegiatan	4 jenis kegiatan	100 %
3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	8 kali	8 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100 %	8 kali	8 kali	100 %
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan	3 kegiatan	7 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %

						dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKARN								
3	25	04	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidayaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	10 kelompok	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidayaan yang	5 kelompok	210 ok	210 ok	210 ok	100 %	5 kelompok	5 kelompok	100 %

						dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan								
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidayaan ikan	3 aktivitas (data, sarpras, kesehatan ikan,					3 aktivitas (data, sarpras, kesehatan ikan,	3 aktivitas (data, sarpras, kesehatan ikan,	100 %
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1 dokumen	10 kelompok	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3),	13 kegiatan	3 paket	8 paket	8 paket	100 %	13 kegiatan	13 kegiatan	100 %

						Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembang an Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(D AK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limangan								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	2 jenis 5 Kegiatan	14 paket	4 paket	4 paket	100 %	2 jenis 5 Kegiatan	2 jenis 5 Kegiatan	100 %
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	1 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %

3	25	04	2,04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	2 kegiatan	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
---	----	----	------	----	---	---	------------	---------	---------	---------	-------	------------	------------	-------

3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan pengawasan perairan umum daratan (PUD)	20 % (selama 5 tahun) (112 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama lima tahun)					20 % (selama 5 tahun) (112 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama lima tahun)	20 % (selama 5 tahun) (112 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama lima tahun)	100 %
3	25	05	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan PERDA tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	11.819.448 Kg	557 orang	285 orang	286 orang	100,35	290 orang	843 orang	34,4 %
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data dan informasi poklachsara	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)					3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	100 %
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat halal bagi poklachsar yang dilaksanakan	150 sampel, 11 kelompok	10 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	150 sampel, 11 kelompok	150 sampel, 11 kelompok	100 %

3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklamsar yang terlaksana	1 kegiatan					1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklamsar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6 kelompok	210 orang	120 orang	120 orang	100 %	6 kelompok	6 kelompok	100 %
3	25	06	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)					3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	100 %
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah safari gemar makan ikan yang terselenggara	2 kegiatan	17 lomba	3 lomba	3 lomba	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %

3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	6 pameran	12 pameran	6 pameran	6 pameran	100 %	6 pameran	6 pameran	100 %
---	----	----	------	----	--	--	-----------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Pada tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang melaksanakan 10 program yang dibagi menjadi 52 kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari Visi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yaitu terwujudnya sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dari 10 program dan 52 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 semuanya telah sesuai dengan target yang telah direncanakan

Secara umum pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- ✓ Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.
- ✓ Adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran di refocusing untuk percepatan penanggulangan Covid -19

Selain hambatan ada juga faktor yang mendorong tercapainya target kinerja program kegiatan antara lain Adanya kegiatan musrenbang bidang kelautan dan perikanan hal tersebut memudahkan dalam perencanaan sehingga antara target dan realisasi dapat tercapai

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra dan kinerja pelayanan terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut antara lain :
 - Mampu merumuskan dan menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam 5 tahun ke depan
 - Mampu merumuskan ketepatan dalam penganggaran dan perencanaan ke depan.

2.2. ANALIS KINERJA PELAYANAN PD

Secara umum untuk kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang dari 2 Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan yang tertuang di Renstra Dinas Perikanan dari keseluruhan telah terealisasi sesuai target yang telah ditentukan.

Dalam kinerja pelayanan pada tahun 2020 permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Over fishing (penangkapan ikan yang telah melebihi batas maksimal yang diperbolehkan);
2. Belum optimalnya produktivitas usaha budidaya perikanan disebabkan keterbatasan ketrampilan, akses permodalan dan sarana prasarana budidaya;
3. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM nelayan, pembudidaya, pengolah ikan maupun masyarakat pesisir;
4. Masih rendahnya nilai produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya usaha pengolahan ikan modern dan pemasaran produk perikanan;
5. Adanya kerusakan pantai ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap dan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan;

Dari permasalahan tersebut dapat dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi dengan cara antara lain :

1. Memberikan himbauan pada nelayan agar dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan memperhatikan daerah penangkapan ikan /fishing ground;
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku perikanan;
3. Mengembangkan produk-produk perikanan melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Memberikan himbauan pada nelayan agar dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang dari 2 Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dapat digambarkan pada tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Produksi perikanan budidaya	--	--	17.638.000	18.167.140	18.712.154	19.273.519	17.800.168	18.167.140	18.712.154	19.273.519	
	Produksi perikanan tangkap	--	--	16.857.314	18.096.881	18.458.819	18.827.995	18.096.881	18.096.881	18.458.819	18.827.995	
	Produksi hasil olahan perikanan			11.000.000	11.587.694	11.819.448	12.055.837	11.360.484	11.587.694	11.819.448	12.055.837	

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 adalah sebesar 17.800.168 kg atau 100,92 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 17.638.000 kg. hal ini disebabkan karena adanya intensifikasi budidaya meliputi penambahan padat tebar, perbaikan manajemen budidaya dan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Target produksi perikanan budidaya untuk tahun 2021 sampai 2023 ditetapkan meningkat 3 persen setiap tahun.

Realisasi Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 18.096.881 Kg atau 107,35 % dibanding target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan telah melampaui target akhir Renstra 2021. Hal ini disebabkan karena adanya Permen KKP no 71 tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat tangkap trawl dan turunannya termasuk cantrang, arad dan garuk. Pada awal penerapan Permen KKP tersebut produksi perikanan tangkap menurun karena adanya larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, namun demikian sisi positif dari pemberlakuan Permen tersebut menyebabkan potensi sumber daya perikanan terjaga dan berangsur membaik. Target produksi perikanan tangkap untuk tahun 2021 sampai 2023 ditetapkan meningkat 2 persen setiap tahun.

Realisasi Produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2020 sebesar 11.360.484 atau 103,28 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penguatan kelembagaan yang meliputi penambahan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) dan diversifikasi produk olahan. Target produksi hasil olahan perikanan untuk tahun 2021 sampai 2023 ditetapkan meningkat sebesar 5 persen setiap tahun.

2.3. HASIL EVALUASI SAKIP PADA DINAS PERIKANAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Evaluator pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar 41,51 dengan kategori C (kurang) yang dapat diartikan bahwa akuntabilitas kinerjanya kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

2.4. ISU ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Kinerja Dinas Perikanan menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat kita lihat dari indikator-indikator dalam Renstra maupun RPJMD 2021 -2026 telah terealisasi sesuai dengan target.

Dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi, masih ada permasalahan yang menjadi kendala dan mempengaruhi produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap namun demikian dinas perikanan juga telah melakukan berbagai macam upaya untuk memecahkan masalah tersebut sehingga dapat meningkatkan produksi di bidang perikanan yang akhirnya dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah agar lebih sejahtera. Inventarisasi permasalahan aktual dan krusial terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perikanan Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
 Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial
 Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

NO	Pokok Permasalahan	Uraian Permasalahan	Pemecahan Masalah (Saran dan Masukan)	Ket
1	Belum Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Pendangkalan muara sehingga menyebabkan kesulitan tambat labuh kapal • Permen KKP No. 71 Tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap trawl dan turunannya termasuk cantrang, arad, garuk 	Jangka Pendek : - Pengerukan muara - Pengadaan eksafator long arm dan pontonnya. Jangka Panjang : - Pembangunan Jetty (dermaga yang meyorok ke laut) sampai kedalaman minimal 6 meter sehingga kapal besar masuk ke pemalang. - Bantuan Alat tangkap Ramah lingkungan, sosialisasi permen KKP - Pengalihan alat tangkap ramah lingkungan secara bertahap	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang dilingkungan TPI 	Pembangunan dan perbaikan Sarpras secara bertahap.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dermaga tambat labuh dan kolam labuh belum tersedia sesuai kebutuhan nelayan pemalang sehingga keamanan dan kenyamanan kapal perikanan belum terjamin 	Pembangunan dermaga dan kolam labuh disesuaikan dgn jumlah kapal yg ada di masing-masing TPI agar keamanan dan kenyamanan nelayan terjamin	
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat penangkapan ikan diperairan umum dengan jenu (racun) dan setrum • 	- Pokmaswas - Sosialisasi - Papan Himbauan - Bantuan benih - Restocking (penambahan populasi	

		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem perairan umum . 	ikan) di perairan umum darat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penebangan mangrove • Alih fungsi lahan • Banjir, rob dan abrasi 	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pesisir Daratan	
2.	Belum Optimalnya Produksi Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pendangkalan Muara Sungai dan saluran irigasi tambak 	Normalisasi muara , Normalisasi Saluran Tambak	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya tingkat kegagalan panen budidaya udang akibat penyakit (AHPND, EMS, White spot dll) 	Pembinaan & Sertifikasi CBIB, laboratorium pengamatan penyakit ikan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana jalan produksi pembudidaya masih banyak yg belum tertangani mengakibatkan produksi budidaya belum maksimal 	Penanganan yang baik serta pembangunan berkelanjutan jalan produksi di wilayah pembudidaya ikan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya banjir dan rob yang merugikan pembudidaya 	Penanaman mangrove, pembuatan tanggul sungai dan pengaturan musim tebar	
3	Belum Optimalnya Produksi hasil olahan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya angka konsumsi ikan perkapita 	Sosialisasi dan pembinaan gemar makan ikan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih maraknya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya 	Pendampingan sertifikat halal bagi poklhas dan pendampingan pengujian kualitas produk hasil perikanan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 		

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penti ng
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperik	Nilai Sakip, Indeks RB dan Indek kepuasan masyarakat		7.906.480.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperik	Nilai Sakip, Indeks RB dan Indek kepuasan masyarakat		7.906.480.900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya	%	185.648.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya	%	185.648.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	3 dokumen 3 kegiatan	133.250.000 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	133.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah RKA skpd yang disusun	1 dokumen	10.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah RKA skpd yang disusun	1 dokumen	10.450.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	1 dokumen	10.113.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	1 dokumen	10.113.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	1 dokumen	11.685.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	1 dokumen	11.685.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperik	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperik	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 dokumen	10.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.426.921.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	1	5.426.921.600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperik	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	38 orang, 14 bulan	5.029.378.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperik	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	38 orang, 14 bulan	5.029.378.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disperik	Jumlah honor pengelola keuangan daerah yang difasilitasi	23 orang, 12 bulan	387.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disperik	Jumlah honor pengelola keuangan daerah yang difasilitasi	23 orang, 12 bulan	387.120.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 dokumen	7.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 dokumen	7.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 laporan	3.023.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 laporan	3.023.600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara	100%	16.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara	1	16.000.000	

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperik	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 kali	16.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperik	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 kali	16.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara	100%	10.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara	1	10.000.000	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan pengelola retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	10.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan pengelola retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100%	213.674.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	1	213.674.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disperik	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 laporan	16.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disperik	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 laporan	16.000.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	2 kegiatan, 110 orang	197.674.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	2 kegiatan, 110 orang	197.674.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100%	811.009.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah	1	811.009.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	24.997.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	24.997.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperik	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	8.434.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperik	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	8.434.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 paket	149.342.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 paket	149.342.600	
Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli			3 jenis	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli				3 jenis			

			Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	1 paket				Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	1 paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperik	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1 paket	262.575.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperik	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1 paket	262.575.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperik	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibeli	1 jenis	12.695.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperik	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibeli	1 jenis	12.695.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperik	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	240 kali	352.965.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperik	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	240 kali	352.965.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 jenis	154.768.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 jenis	154.768.100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperik	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 jenis	33.815.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperik	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 jenis	33.815.000	
	Pengadaan Mebel	Disperik	Jumlah mebeuler yang dibeli	2 set	11.226.000	Pengadaan Mebel	Disperik	Jumlah mebeuler yang dibeli	2 set	11.226.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	17 buah	103.727.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	17 buah	103.727.100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 set	6.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 set	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	763.780.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	763.780.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperik	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	9.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperik	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	9.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	4 rekening, 12 bulan	122.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	4 rekening, 12 bulan	122.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperik	Jumlah SDM non pns setiap bulan	34 orang	632.080.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperik	Jumlah SDM non pns setiap bulan	34 orang	632.080.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Terpeliharanya barang milik daerah	3 jenis	294.180.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Terpeliharanya barang milik daerah	3 jenis	294.180.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	54 kendaraan	75.385.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	54 kendaraan	75.385.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	47.580.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	47.580.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	171.215.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	171.215.000	
Penataan Organisasi	Disperik	prosentase dukungan terhadap penataan organisasi	100%	30.500.000	Penataan Organisasi	Disperik	prosentase dukungan terhadap penataan organisasi	1	30.500.000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Disperik	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	4 laporan	14.500.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Disperik	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	4 laporan	14.500.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Disperik	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata	12 kali	16.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Disperik	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas	12 kali	16.000.000	

	dan Tata Laksana		laksana yang terlaksana			dan Tata Laksana		pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Disperik	Prosentase TPI yang memenuhi standart	72 %	3.103.501.100	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Disperik	Prosentase TPI yang memenuhi standart	77 %	3.103.501.100	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Persentase TPI yang tertangani	100 %	1.404.501.100	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Persentase TPI yang tertangani	100 %	1.404.501.100	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Disperik	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	5 kali	70.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Disperik	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	5 kali	70.000.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	14 paket	1.334.501.100	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	14 paket	1.334.501.100	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan	2 kegiatan (pembinaan dan	425.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	425.000.000	

			dan hari nusantara yang terlaksana	hari nusantara)				nelayan dan hari nusantara yang terlaksana			
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	7 kali	225.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	7 kali	225.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	1 kali	200.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	1 kali	200.000.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	1.099.000.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	1.099.000.000	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	3 kali, 12 bulan	549.800.000	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	3 kali, 12 bulan	549.800.000	

	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	15 kali	549.200.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	15 kali	549.200.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	175.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	175.000.000	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Disperik	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	6 kali	175.000.000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Disperik	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	6 kali	175.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Disperik	Persentase sarana dan prasarana yang tertangani		3.376.496.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Disperik	Persentase sarana dan prasarana yang tertangani		3.376.496.000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina	4 jenis kegiatan	602.200.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina	4 jenis kegiatan	602.200.000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	8 kali pembinaan	89.600.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	8 kali pembinaan	89.600.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	3 kegiatan	33.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	3 kegiatan	33.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	5 kelompok	50.500.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya	5 kelompok	50.500.000	

								ikan yang dilaksanakan			
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Disperik	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	5 kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 kegiatan	429.100.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Disperik	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	5 kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 kegiatan	429.100.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Disperik	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan	3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan)	2.774.296.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Disperik	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan	3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan)	2.774.296.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1 dokumen	40.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1 dokumen	40.000.000	

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan	13 kegiatan	2.087.246.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan	13 kegiatan	2.087.246.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)	Disperik	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah	2 jenis, 5 kegiatan	100.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)	Disperik	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia,	2 jenis, 5 kegiatan	100.000.000	

Daerah Kabupaten/Kota		sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan			Daerah Kabupaten/Kota		jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan			
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	3 unit, 1 paket, 1 kegiatan, 1 paket	497.050.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	3 unit, 1 paket, 1 kegiatan, 1 paket	497.050.000	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan	2 kegiatan	50.000.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi	2 kegiatan	50.000.000	

			budidaya yang terlaksana					banding kawasan budidaya yang terlaksana			
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disperik	Peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD)	20 % (selama 5 tahun)(12 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	194.350.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disperik	Peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD)	20 % (selama 5 tahun)(112 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	194.350.000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Disperik	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	1 dokumen	194.350.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Disperik	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	1 dokumen	194.350.000	

	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	1 dokumen	194.350.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	1 dokumen	194.350.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Disperik	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	5 %	1.345.300.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Disperik	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	5 %	1.345.300.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah data dan informasi poklhasr	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	328.450.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah data dan informasi poklhasr	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	328.450.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah	Disperik	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasr yang dilaksanakan	150 sampel, 11 kelompok	328.450.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah	Disperik	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasr yang	150 sampel, 11 kelompok	328.450.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		dilaksanakan			
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasr yang terlaksana	1 kegiatan	301.200.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasr yang terlaksana	1 kegiatan	301.200.000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah poklhasr yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6 kelompok	301.200.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah poklhasr yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6 kelompok	301.200.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	715.650.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	715.650.000	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara	2 kegiatan	357.802.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara	2 kegiatan	357.802.000	

	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	6 pameran	357.848.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	6 pameran	357.848.000	
--	--	----------	--	-----------	-------------	--	----------	--	-----------	-------------	--

Dari tabel di atas dapat kita analisa perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dapat kami jelaskan bahwa Program dan kegiatan dari rancangan RKPD tidak semuanya sesuai hal tersebut dikarenakan :

- Untuk program rutin adanya ketidaksesuaian disebabkan karena adanya kenaikan tarif harga;
- Pada awal penganggaran awal rancangan RKPD belum terakomodir anggaran yang bersumber dari Dana alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan.

2.5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan dari masyarakat didapat dari hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, nelayan, ketua KPD dan lain-lain yang diperoleh dari pelaksanaan musrenbang kabupaten maupun musrenbang bidang kelautan dan perikanan. Adanya kegiatan musrenbang bidang kelautan dan perikanan memudahkan dalam perencanaan sehingga antara target dan realisasi dapat tercapai. Dari hasil musrenbang kabupaten dan musrenbang bidang kelautan dan perikanan diperoleh usulan sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022
Dinas Perikanan Kabupaten Pematang

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
FISIK						
1	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	TPI Tanjungsari, Kelurahan Sugihwaras	Pembangunan Dermaga TPI Tanjungsari	100 m	1.500.000.000	Bidang Penangkapan

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	TPI Tanjungsari, Kelurahan Sugihwaras	Rehab atap TPI Tanjungsari	50 m ²	200.000.000	Bidang Penangkapan
3	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	TPI Ketapang Desa Ketapang	Rehab Tambat labuh TPI Ketapang	42,25 m	200.000.000	Bidang Penangkapan
4	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	TPI Mojo Desa Mojo	Rehab tempat parker dan gudang TPI Mojo	80 m ²	200.000.000	Bidang Penangkapan
5	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	TPI Asemtoyong, Desa Asemtoyong	Rehab lantai TPI Asemtoyong	50 m ²	200.000.000	Bidang Penangkapan
6	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	TPI Nyamplungsari, Desa Nyamplungsari	Finishing Pembangunan Mushola TPI Nyamplungsari	15,52 m ²	200.000.000	Bidang Penangkapan
7	Peningkatan Jalan Produksi Desa Danasari	Desa Danasari Kecamatan Pemalang	Rabat beton jalan produksi menuju tambak	150 meter	112.500.000	Diusulkan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Danasari
8	Peningkatan Jalan Produksi Desa Lawangrejo	Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang	Rabat beton jalan produksi menuju tambak	250 meter	187.500.000	Diusulkan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Lawangrejo
10	Peningkatan Jalan Produksi Desa Tasikrejo	Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami	Rabat beton jalan produksi perikanan	200 meter	150.000.000	Diusulkan Oleh KPD Mino Raharjo
10	Rehab TPHT KPD Limbangan	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami	Peningkatan TPHT	36 m ²	90.000.000	Diusulkan Oleh KPD Mino Rejo

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Rehab TPHT Blok Krantil Desa Pesantren	Desa Pesantren Kecamatan Ulujami	Peningkatan TPHT	36 m ²	90.000.000	Diusulkan Oleh KPD Mino Mulyo
12	Rehab TPHT Desa Pesantren	Desa Pesantren Kecamatan Ulujami	Peningkatan TPHT	52 m ²	130.000.000	Diusulkan Oleh KPD Mino Mulyo
13	Pembangunan Unit pengolahan dan pemasar hasil perikanan	Kabupaten Pemalang	Pembangunan los pengolahan dan los pemasar hasil perikanan			
NON FISIK						
1.		Desa Gintungi Kecamatan Comal	Pelatihan Pengelolaan bahan baku ikan Lele (Abon dan Nugget)	30 orang	30.000.000	Bina Usaha Musren Kab
2.		Desa Kaligelang Kecamatan Taman	Pelatihan budidaya ikan patin	30 orang	30.000.000	Bina Usaha Musren Kab
3	Pelatihan Teknologi pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Comal dan Ulujami	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	4 kali	150.000.000	Bidang Binus
4	Pembinaan mutu hasil perikanan	Kecamatan se kabupaten pemalang	Jumlah pengolahan yang dibina	50 orang	50.000.000	Bidang Binus
5.	Pelatihan budidaya perikanan	Desa Gedeg Kecamatan Comal	Pelatihan Budidaya ikan lele	30 orang	35.000.000	Budidaya Musren Kab

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Apresiasi Teknologi pengolahan produk nilai tambah	Desa Blendung Kecamatan Ulujami	Pelatihan pembuatan sale bandeng	25 Orang	25.000.000	Bina Usaha Musren Kab
7.	Pelatihan budidaya perikanan	Desa Kaligelang	Pelatihan pembuatan pakan ikan lele	30 orang	30.000.000	Budidaya
8.	Pelatihan budidaya perikanan	Desa Kaligelang	Pelatihan cara pemijahan	30 orang	20.000.000	Budidaya
9.	Pelatihan budidaya perikanan	Desa Kendaldoyong	Pelatihan pembuatan pellet mandiri	30 orang	35.000.000	Budidaya
10.	Apresiasi Teknologi pengolahan produk nilai tambah	Desa Iser dan Desa Moga	Pelatihan diversifikasi olahan ikan	25 orang	25.000.000	Bina Usaha
11.	Pelatihan pengolahan ikan berorientasi pasar	Desa Iser	Pelatihan pemasaran produk berbasis online	25 orang	25.000.000	Bina Usaha
12.	Apresiasi Teknologi pengolahan produk nilai tambah	Desa Wonokromo dan Desa Tumbal	Pelatihan sanitasi dan higienitas ruang produksi dan pengolahan	25 orang	25.000.000	Bina Usaha

2.5. Pokok Pikiran Dewan

Usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang berkaitan dengan Dinas Perikanan ada 1 yaitu :

**Tabel 2.6. Daftar Pokok Pikiran Tahun 2022
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang**

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
FISIK						
1	Rabat Beton Jalan Produksi Perikanan Blok Ndasun	RT 06/08 Desa Mojo Kecamatan Ulujami	Panjang Jalan Produksi Perikanan yang dirabat beton	200 m	200.000.000	Pokir Dewan

Pokok pikiran dewan tersebut akan diakomodir di tahun 2022, melalui program pengelolaan perikanan budidaya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun Pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 mengacu pada pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Pemalang yaitu "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni (AMAN)". Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, program pemerintah Pusat yang direncanakan di wilayah Kabupaten Pemalang adalah :

1. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asem Doyong Doyong
2. Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKMs serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan
3. Penanganan kerusakan pantai di Kabupaten Pemalang

Selain program-program percepatan pembangunan ekonomi kawasan, program Pemerintah Pusat lainnya di Kabupaten Pemalang adalah program Pengembangan Klaster vannamae di Kabupaten Pemalang yang merupakan program untuk ekstensifikasi pengembangan lahan budidaya udang vannamae.

a. Kebijakan Nasional Disinkronkan dengan RPJMN 2020-2024 dan renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top

down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”, dengan fokus pembangunan 2021 pada:

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Rencana Straregis Pembangunan Kelautan dan Perikanan tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi Nasional dan Daerah. Arah kebijakan tersebut terkait dengan tema agenda Pembangunan Nasional yaitu Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

1. Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, Sumber Daya Air, Sumber Daya Energi serta kehutanan.
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *Agro Fishery Industry*, kemaritiman, energi industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital

Prioritas Pembangunan Nasional yang sesuai dengan Renja Dinas Perikanan diantaranya adalah :

1. Prioritas Ke-6: Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng
2. Prioritas Ke-7: Integrasi pelabuhan perikanan dan *Fish Market* bertaraf internasional

b. Kebijakan Daerah Disinkronkan dengan RPJMD Propinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah tahun 2021

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mencapai visi: "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi", yang ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada "Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan pembangunan ini telah dilakukan penyesuaian dari arah kebijakan "Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 ini dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2021

Prioritas Daerah Jawa Tengah yang berkaitan dengan dinas perikanan yaitu Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dengan focus produksi dan kualitas hasil perikanan dengan pengembangan kapasitas usaha perikanan skala kecil dan menengah yang berorientasi ekspor; peningkatan kemudahan dan pelayanan perijinan: pengembangan sarana prasarana dan fasilitasi pelabuhan nelayan perikanan pantai yang

terintegrasi dan berkelanjutan; serta peningkatan konsumsi makan ikan utamanya pada kabupaten non pesisir.

Arah dan Kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan Dinas Perikanan salah satunya adalah Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan yaitu Meningkatkan harkat dan taraf hidup Nelayan serta masyarakat pesisir. Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 yang diarahkan untuk mencapai Visi “ Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi “. Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 yang berkaitan dengan Dinas Perikanan antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran.

c. Kebijakan Daerah Kabupaten pemalang berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 mengacu pada pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Pemalang yaitu "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni (AMAN)".

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut telah dirumuskan enam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan .

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pematang mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, dengan sasaran daerah meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai ekonomi berbasis potensi lokal.

Sasaran perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pematang yaitu meningkatnya produksi sector perikanan dengan indikator sasaran Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi perikanan tangkap, dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap. target tahun 2022 sebesar 18.458.819 kg
2. Meningkatnya Produksi perikanan budidaya, dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan budidaya target tahun 2022 sebesar 18.712.154 kg
3. Meningkatnya Produksi hasil olahan perikanan , dengan indikator kinerja jumlah produksi hasil olahan perikanan target tahun 2022 sebesar 11.819.448 kg

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pematang Tahun 2021 yang terkait dengan Dinas Perikanan meliputi;

1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, disertai dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan pengelolaan produk unggulan daerah.

2. Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas melalui upaya pengembangan budidaya pertanian, peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap serta pengembangan peternakan.

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang terpilih tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026, maka Tahun 2022 merupakan Tahun Kedua Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Tahun 2022 juga merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten pemalang Tahun 2021-2026 yang akan datang. Oleh karena itu Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
5. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
6. Administrasi umum perangkat daerah
7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
10. Penataan Organisasi

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kegiatannya meliputi :

1. Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota
2. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten / kota

3. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Penerbitan Tanda Daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota
- 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatannya meliputi :**
 1. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
 2. Pengelolaan Pembudidaya ikan
- 4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kegiatannya meliputi :**
 1. Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air
- 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatannya meliputi :**
 1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 3. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten / kota

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 dijabarkan pada tabel 3.1 dibawah ini

**Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pematang Jaya**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip, Indeks RB dan Indek kepuasan masyarakat	Disperik		7.906.480.9 00	DAU			7.906.480.9 00

3	25	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya	Disperik	%	185.648.000	DAU		%	185.648.000
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Disperik	3 dokumen	133.250.000	DAU		3 dokumen	133.250.000
						Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	Disperik	3 kegiatan	-	DAU		3 kegiatan	-
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA skpd yang disusun	Disperik	1 dokumen	10.450.000	DAU		1 dokumen	10.450.000
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	Disperik	1 dokumen	10.113.000	DAU		1 dokumen	10.113.000
3	25	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	Disperik	1 dokumen	11.685.000	DAU		1 dokumen	11.685.000

3	25	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen dokumen DPA skpd yang disusun	Disperik	1 dokumen	10.150.000	DAU		1 dokumen	10.150.000
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Disperik	2 dokumen	10.000.000	DAU		2 dokumen	10.000.000
3	25	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	Disperik	100%	5.426.921.600	DAU		1	5.426.921.600
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	Disperik	38 orang, 14 bulan	5.029.378.000	DAU		38 orang, 14 bulan	5.029.378.000
3	25	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelola keuangan daerah yang difasilitasi	Disperik	23 orang, 12 bulan	387.120.000	DAU		23 orang, 12 bulan	387.120.000
3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Disperik	5 dokumen	7.400.000	DAU		5 dokumen	7.400.000
3	25	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran dan	Disperik	2 laporan	3.023.600	DAU		2 laporan	3.023.600

					Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	prognosis yang disusun							
3	25	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara	Disperik	100%	16.000.000	DAU		1	16.000.000
3	25	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Disperik	12 kali	16.000.000	DAU		12 kali	16.000.000
3	25	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara	Disperik	100%	10.000.000	DAU		1	10.000.000
3	25	01	2,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelola retribusi daerah yang disusun	Disperik	1 dokumen	10.000.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
3	25	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	Disperik	100%	213.674.000	DAU		1	213.674.000

3	25	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Disperik	12 laporan	16.000.000	DAU		12 laporan	16.000.000
3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	Disperik	2 kegiatan, 110 orang	197.674.000	DAU		2 kegiatan, 110 orang	197.674.000
3	25	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah	Disperik	100%	811.009.200	DAU		1	811.009.200
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Disperik	1 paket	24.997.500	DAU		1 paket	24.997.500
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Disperik	5 jenis	8.434.100	DAU		5 jenis	8.434.100
3	25	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	Disperik	1 paket	149.342.600	DAU		1 paket	149.342.600
						Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli		3 jenis				DAU	

						Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia		1 paket		DAU		1 paket	-
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Disperik	1 paket	262.575.000	DAU		1 paket	262.575.000
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibeli	Disperik	1 jenis	12.695.000	DAU		1 jenis	12.695.000
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Disperik	240 kali	352.965.000	DAU		240 kali	352.965.000
3	25	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Disperik	3 jenis	154.768.100	DAU		3 jenis	154.768.100
3	25	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Disperik	1 jenis	33.815.000	DAU		1 jenis	33.815.000
3	25	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	Disperik	2 set	11.226.000	DAU		2 set	11.226.000

3	25	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Disperik	17 buah	103.727.100	DAU		17 buah	103.727.100
3	25	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	Disperik	1 set	6.000.000	DAU		1 set	6.000.000
3	25	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Disperik	3 jenis	763.780.000	DAU		3 jenis	763.780.000
3	25	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Disperik	500 surat	9.300.000	DAU		500 surat	9.300.000
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Disperik	4 rekening, 12 bulan	122.400.000	DAU		4 rekening, 12 bulan	122.400.000
3	25	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM non pns setiap bulan	Disperik	34 orang	632.080.000	DAU		34 orang	632.080.000
3	25	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Disperik	3 jenis	294.180.000	DAU		3 jenis	294.180.000
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan	Disperik	54 kendaraan	75.385.000	DAU		54 kendaraan	75.385.000

					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara							
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Disperik	25 unit	47.580.000	DAU		25 unit	47.580.000
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Disperik	2 gedung	171.215.000	DAU		2 gedung	171.215.000
3	25	01	2,13		Penataan Organisasi	prosentase dukungan terhadap penataan organisasi	Disperik	100%	30.500.000	DAU		1	30.500.000
3	25	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	Disperik	4 laporan	14.500.000	DAU		4 laporan	14.500.000
3	25	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	Disperik	12 kali	16.000.000	DAU		12 kali	16.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase TPI yang memenuhi standart		72 %	3.103.501.100	DAU		77 %	3.103.501.100

3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase TPI yang tertangani		2 jenis	1.404.501.100	DAU		2 jenis	1.404.501.100
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia		5 kali	70.000.000	DAU		5 kali	70.000.000
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik		14 paket	1.334.501.100	DAU		14 paket	1.334.501.100
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana		2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	425.000.000	DAU		2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	425.000.000
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok		7 kali	225.000.000	DAU		7 kali	225.000.000

3	25	03	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana		1 kali	200.000.000	DAU		1 kali	200.000.000
3	25	03	2,03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani		2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	1.099.000.000	DAU		2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	1.099.000.000
3	25	03	2,03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)		3 kali, 12 bulan	549.800.000	DAU		3 kali, 12 bulan	549.800.000
3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)		15 kali	549.200.000	DAU		15 kali	549.200.000

3	25	03	2,04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal		2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	175.000.000	DAU		2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	175.000.000
3	25	03	2,04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan		6 kali	175.000.000	DAU		6 kali	175.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani		3% (dalam 5 tahun)	3.376.496.000	DAU		3 % (dalam 5 tahun)	3.376.496.000
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina		4 jenis kegiatan	602.200.000	DAU		4 jenis kegiatan	602.200.000
3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan		8 kali pembinaan	89.600.000	DAU		8 kali pembinaan	89.600.000

3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN		3 kegiatan	33.000.000	DAU		3 kegiatan	33.000.000
3	25	04	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan		5 kelompok	50.500.000	DAU		5 kelompok	50.500.000
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan		5 kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 kegiatan	429.100.000	DAU		5 kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 kegiatan	429.100.000

3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan		3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan)	2.774.296.0 00	DAU		3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan)	2.774.296.0 00
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia		1 dokumen	40.000.000	DAU		1 dokumen	40.000.000
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa		13 kegiatan	2.087.246.0 00	DAU		13 kegiatan	2.087.246.0 00

						Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan							
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan		2 jenis, 5 kegiatan	100.000.000	DAU		2 jenis, 5 kegiatan	100.000.000
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia		3 unit, 1 paket, 1 kegiatan, 1 paket	497.050.000	DAU		3 unit, 1 paket, 1 kegiatan, 1 paket	497.050.000

3	25	04	2,04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana		2 kegiatan	50.000.000	DAU		2 kegiatan	50.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase peningkatan pengawasan perairan umum daratan (PUD)		20 % (selama 5 tahun)(112 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	194.350.000	DAU		20 % (selama 5 tahun)(112 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	194.350.000

3	25	05	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan		1 dokumen	194.350.000	DAU		1 dokumen	194.350.000
3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun		1 dokumen	194.350.000	DAU		1 dokumen	194.350.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan		5 %	1.345.300.000	DAU		5 %	1.345.300.000
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data dan informasi poklhasar		3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	328.450.000	DAU		3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	328.450.000

3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasar yang dilaksanakan		150 sampel, 11 kelompok	328.450.000	DAU		150 sampel, 11 kelompok	328.450.000
3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasar yang terlaksana		1 kegiatan	301.200.000	DAU		1 kegiatan	301.200.000
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan		6 kelompok	301.200.000	DAU		6 kelompok	301.200.000
3	25	06	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan		3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	715.650.000	DAU		3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	715.650.000

3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara		2 kegiatan	357.802.000	DAU		2 kegiatan	357.802.000
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti		6 pameran	357.848.000	DAU		6 pameran	357.848.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN

Dinas Perikanan Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dengan prioritas pembangunan pada tahun 2022 diarahkan pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk peningkatan persentase TPI yang memenuhi standar sebesar 72%. Program ini didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai output sebagai berikut :

- Persentase TPI yang tertangani 100%
- Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan TPI sebanyak 2 kegiatan
- Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dokumen kapal sebanyak 2 dokumen
- Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik sebanyak 5 unit
- Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan Hari Nusantara yang terlaksana sebanyak 2 kegiatan
- Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara sebanyak 3 kali
- Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (karyawan, nelayan, dan bakul)
- Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan sebanyak 6 kali

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Diarahkan untuk pencapaian indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sebanyak 3%. Program ini didukung kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai output sebagai berikut :

- Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi bantuan pendanaan, dan pemberian kemudahan akses iptek serta pendidikan dan pelatihan sebanyak 4 kegiatan
- Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan sebanyak 3 aktivitas meliputi data, sarpras, dan kesehatan ikan

c. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Diarahkan untuk peningkatan pengawasan perikanan umum darat, pencapaian program ini didukung kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai output jumlah penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan perikanan yang tersusun sebanyak 1 dokumen.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Diarahkan untuk pencapaian peningkatan unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan sebesar 5% per tahun. Pencapaian program ini didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai output sebagai berikut :

- Jumlah data dan informasi poklhasar sebanyak 3 dokumen
- Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat halal bagi poklhasar yang dilaksanakan di 20 lokasi dan 15 poklhasar
- Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasar yang terlaksana sebanyak 1 kali kegiatan
- Jumlah dan jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan sebanyak 3 kegiatan

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip, Indeks RB dan Indeks kepuasan masyarakat		7.906.480.900		7.906.480.900	Disperik
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya	%	185.648.000	%	185.648.000	Disperik

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	133.250.000	3 dokumen	133.250.000	Disperik
				Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	3 kegiatan	-	3 kegiatan	-	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA skpd yang disusun	1 dokumen	10.450.000	1 dokumen	10.450.000	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan skpd yang disusun	1 dokumen	10.113.000	1 dokumen	10.113.000	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA skpd yang disusun	1 dokumen	11.685.000	1 dokumen	11.685.000	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen dokumen DPA skpd yang disusun	1 dokumen	10.150.000	1 dokumen	10.150.000	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	Disperik
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.426.921.600	100%	5.426.921.600	Disperik
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	38 orang, 14 bulan	5.029.378.000	38 orang, 14 bulan	5.029.378.000	Disperik

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelola keuangan daerah yang difasilitasi	23 orang, 12 bulan	387.120.000	23 orang, 12 bulan	387.120.000	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 dokumen	7.400.000	5 dokumen	7.400.000	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 laporan	3.023.600	2 laporan	3.023.600	Disperik
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara	100%	16.000.000	100%	16.000.000	Disperik
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 kali	16.000.000	12 kali	16.000.000	Disperik
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Disperik
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelola retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	Disperik
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100%	213.674.000	100%	213.674.000	Disperik

			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 laporan	16.000.000	12 laporan	16.000.000	Disperik		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	2 kegiatan, 110 orang	197.674.000	2 kegiatan, 110 orang	197.674.000	Disperik		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100%	811.009.200	100%	811.009.200	Disperik		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	24.997.500	1 paket	24.997.500	Disperik		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	8.434.100	5 jenis	8.434.100	Disperik		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 paket	149.342.600	1 paket	149.342.600	Disperik		
				Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3 jenis				3 jenis		Disperik
				Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	1 paket				1 paket		Disperik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1 paket	262.575.000	1 paket	262.575.000	Disperik		

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang dibeli	1 jenis	12.695.000	1 jenis	12.695.000	Disperik
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	240 kali	352.965.000	240 kali	352.965.000	Disperik
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 jenis	154.768.100	3 jenis	154.768.100	Disperik
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 jenis	33.815.000	1 jenis	33.815.000	Disperik
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	2 set	11.226.000	2 set	11.226.000	Disperik
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	17 buah	103.727.100	17 buah	103.727.100	Disperik
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 set	6.000.000	1 set	6.000.000	Disperik
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	763.780.000	3 jenis	763.780.000	Disperik
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	9.300.000	500 surat	9.300.000	Disperik

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	4 rekening, 12 bulan	122.400.000	4 rekening, 12 bulan	122.400.000	Disperik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM non pns setiap bulan	34 orang	632.080.000	34 orang	632.080.000	Disperik
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	3 jenis	294.180.000	3 jenis	294.180.000	Disperik
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	54 kendaraan	75.385.000	54 kendaraan	75.385.000	Disperik
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	47.580.000	25 unit	47.580.000	Disperik
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	171.215.000	2 gedung	171.215.000	Disperik
			Penataan Organisasi	prosentase dukungan terhadap penataan organisasi	100%	30.500.000	100%	30.500.000	Disperik
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	4 laporan	14.500.000	4 laporan	14.500.000	Disperik

			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	12 kali	16.000.000	12 kali	16.000.000	Disperik
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase TPI yang memenuhi standart	72	3.103.501.100	77	3.103.501.100	Disperik
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase TPI yang tertangi	100	1.404.501.100	100	1.404.501.100	Disperik
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	5 kali	70.000.000	5 kali	70.000.000	Disperik
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	14 paket	1.334.501.100	14 paket	1.334.501.100	Disperik
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	425.000.000	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	425.000.000	Disperik

			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	7 kali	225.000.000	7 kali	225.000.000	Disperik
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000	Disperik
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	1.099.000.000	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	1.099.000.000	Disperik
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	3 kali, 12 bulan	549.800.000	3 kali, 12 bulan	549.800.000	Disperik
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	15 kali	549.200.000	15 kali	549.200.000	Disperik

			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	175.000.000	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	175.000.000	Disperik
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	6 kali	175.000.000	6 kali	175.000.000	Disperik
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani	3 %	3.376.496.000	3 %	3.376.496.000	Disperik
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina	4 jenis kegiatan	602.200.000	4 jenis kegiatan	602.200.000	Disperik
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	8 kali pembinaan	89.600.000	8 kali pembinaan	89.600.000	Disperik

			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	3 kegiatan	33.000.000	3 kegiatan	33.000.000	Disperik
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	5 kelompok	50.500.000	5 kelompok	50.500.000	Disperik
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	5 kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 kegiatan	429.100.000	5 kelompok, 350 peserta pelatihan, 1 kegiatan	429.100.000	Disperik
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan	3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan)	2.774.296.000	3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan)	2.774.296.000	Disperik

			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	Disperik
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan	13 kegiatan	2.087.246.000	13 kegiatan	2.087.246.000	Disperik
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	2 jenis, 5 kegiatan	100.000.000	2 jenis, 5 kegiatan	100.000.000	Disperik

			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	3 unit, 1 paket, 1 kegiatan, 1 paket	497.050.000	3 unit, 1 paket, 1 kegiatan, 1 paket	497.050.000	Disperik
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	2 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	50.000.000	Disperik
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD)	20 % (selama 5 tahun)(11 2 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	194.350.000	20 % (selama 5 tahun)(11 2 kelompok nelayan yang sudah ada + target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	194.350.000	Disperik

			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	1 dokumen	194.350.000	1 dokumen	194.350.000	Disperik
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	1 dokumen	194.350.000	1 dokumen	194.350.000	Disperik
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan		1.345.300.000		1.345.300.000	Disperik
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data dan informasi poklhasar	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	328.450.000	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	328.450.000	Disperik

			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasr yang dilaksanakan	150 sampel, 11 kelompok	328.450.000	150 sampel, 11 kelompok	328.450.000	Disperik
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasr yang terlaksana	1 kegiatan	301.200.000	1 kegiatan	301.200.000	Disperik
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasr yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6 kelompok	301.200.000	6 kelompok	301.200.000	Disperik
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	715.650.000	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	715.650.000	Disperik
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara	2 kegiatan	357.802.000	2 kegiatan	357.802.000	Disperik

			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	6 pameran	357.848.000	6 pameran	357.848.000	Disperik
--	--	--	--	--	-----------	-------------	-----------	-------------	----------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk satu tahun berjalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dimana Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya / anggaran yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah – langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perikanan Tahun 2022 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai perwujudan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.

Pemalang, Agustus 2022


KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG
DISPERIK
SUHARTO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620427 198603 1 010